

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM

Nomor : 861/PSDKP.2/TU.140/VII/2022

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Hal : Laporan Kinerja POA Periode Triwulan II 2022
Tanggal : 15 Juli 2022

Sehubungan dengan telah dilakukan pengukuran kinerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Ditjen. PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan II 2022 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.



ditandatangani secara elektronik

Pung Nugroho Saksono

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TRIWULAN II 2022**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRF

KATA PENGANTAR

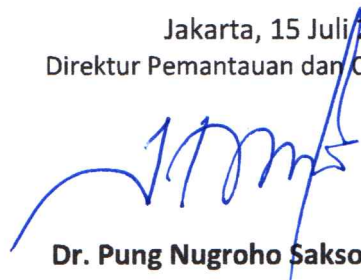
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan II 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sampai dengan Triwulan II 2022.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2022.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan II 2022 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : ⁽¹⁾ Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; ⁽²⁾ Operasional Pusat Pengendalian; ⁽³⁾ Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan ⁽⁴⁾ Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Triwulan II kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah berhasil melakukan beberapa kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Triwulan II Tahun 2022. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 15 Juli 2022
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Triwulan II 2022

1. Koordinator Kelompok Operasional Pusat dan Pengendalian
2. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha
3. Husain, S.Kom

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2022

1. Ikrom Bungsu. S.Pi
2. Nova Roy Yohana, A.Md, S.Sos
3. Ridwan Nurzеха, S.Si
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
5. Bilmantasya Al Fattha, ST
6. Noval Reza Jaya, A.Md

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Maksud dan Tujuan	11
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	14
Sistematika Penyajian	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	17
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	17
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	19
Perjanjian Kinerja 2022	19
Pengukuran Capaian Kinerja	22

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II 2022	24
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	26
Sasaran Kegiatan 1	26
Sasaran Kegiatan 2	29
Sasaran Kegiatan 3	33
Sasaran Kegiatan 4	45
Sasaran Kegiatan 5	47
Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya	57

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan II 2022	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022	20
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022	22
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan II 2022	24
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan II 2022	27
Tabel 6. Daftar Provinsi Aktif Melaporkan Pembinaan Pokmaswas Periode Triwulan II 2022	28
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Triwulan II 2022.....	29
Tabel 8. Rincian capaian per Indikator	30
Tabel 9. Indikasi Kapal Perikanan	30
Tabel 10. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi	31
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan II 2022.....	33
Tabel 12. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode VI 2022	34
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan II 2022.....	43
Tabel 14. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Triwulan II 2022	43
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan II 2022.....	45
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan II 2022.....	46
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan II 2022.....	47
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan II 2022.....	48
Tabel 19. Perbandingan Hasil IKM.....	48
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan II 2022.....	49
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan II 2022.....	50
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan II 2022.....	50
Tabel 23. Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan II 2022	51
Tabel 24. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan II 2022	52
Tabel 25. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan II 2022	53
Tabel 26. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan II 2022	53
Tabel 27. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan II 2022	54
Tabel 28. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan II 2022	55
Tabel 29. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan II 2022	56
Tabel 30. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 30 Juni 2022	57
Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Direktorat POA Periode Triwulan II 2022.....	61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14
Gambar 2. Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Triwulan II 2022	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II 2022. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022 Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja (IK) dengan target pencapaian IKU/IK periode Triwulan II 2022 sebanyak 9 IKU/IK telah memenuhi target dan 9 IKU/IK yang belum dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode berikutnya. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan II 2022 mencapai 111,33% mengalami penurunan dari capaian triwulan tahun II 2021 sebesar 118,97%. Hal ini dikarenakan perubahan target capaian Indikator pada triwulan II 2022 yang sebelumnya target diakhir tahun menjadi target tiap triwulan.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA sampai dengan Triwulan II 2022 telah melaksanakan 10 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan yang tertuang dalam DIPA Ditjen PSDKP tahun 2022. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp316.080.010.000 (tiga ratus enam belas miliar delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp332.477.900.000 (tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan II 2022 sebesar **Rp 175,836,878,956.-**, atau sekitar **52,89%** dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dari periode Triwulan II 2021 (**Rp 76,132,444,288**), kinerja penyerapan anggaran tersebut sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2022.

Direktorat POA telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan II 2022 berdasarkan prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode Triwulan II 2022 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan II 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	20	35,29	176,45
2	Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	40	43,33	108,33
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	99,12	107,74
		4	Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5	88,87	101,57
		5	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	90	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
		7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	92,01	115,01
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	-	-	-
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	93,14	120,96
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA (Nilai)	-	-	-
		13	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Inovasi)	-	-	-
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	99,31	115,48
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	100
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA					111,33%	

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan II 2022

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA Triwulan II 2022 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode Triwulan II 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan II 2022 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020-2024

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin komplek dan beraneka ragam jenisnya serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan IUU fishing. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2015-2020 yaitu sebanyak 707 kapal terdiri dari kapal kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Semakin kompleknya ancaman pelanggaran di laut dibidang kelautan dan perikanan tentunya memerlukan perubahan dalam pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, artificial intelligent (AI), big data serta Internet of Thing (IoT).

Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 ini menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan **penangkapan ikan terukur** merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis output control (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (while fishing) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

ILLEGAL FISHING MASIH MARAK

Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing*. Hal ini terbukti dengan masih tertangkapnya kapal-kapal pelaku *illegal fishing* oleh

Kapal Pengawas Perikanan. Tercatat sebanyak 8 Kapal ikan asing tertangkap oleh Kapal Pengawas dan sebanyak 65 kapal ikan Indonesia tertangkap oleh Kapal Pengawas sampai dengan bulan Juni 2022.

Eskalasi ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara juga terus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

PENGUATAN ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan *Exchange of Notes* (ENs) tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2 unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu "Hakurei Maru" dan "Shirahagi Maru". Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63 meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan.

Sebelum kedua kapal diserahkan ke KKP di Jakarta, Pemerintah Jepang melakukan perbaikan kapal di Jepang dengan alokasi anggaran JPY 2,2 Miliar. Saat ini kedua kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan di Galangan kapal Jepang dan dijadwalkan Sailing dari Jepang untuk diserahkan di Jakarta pada Tahun 2023.

Sebanyak 2 unit Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

SINERGITAS OPERASI BERSAMA

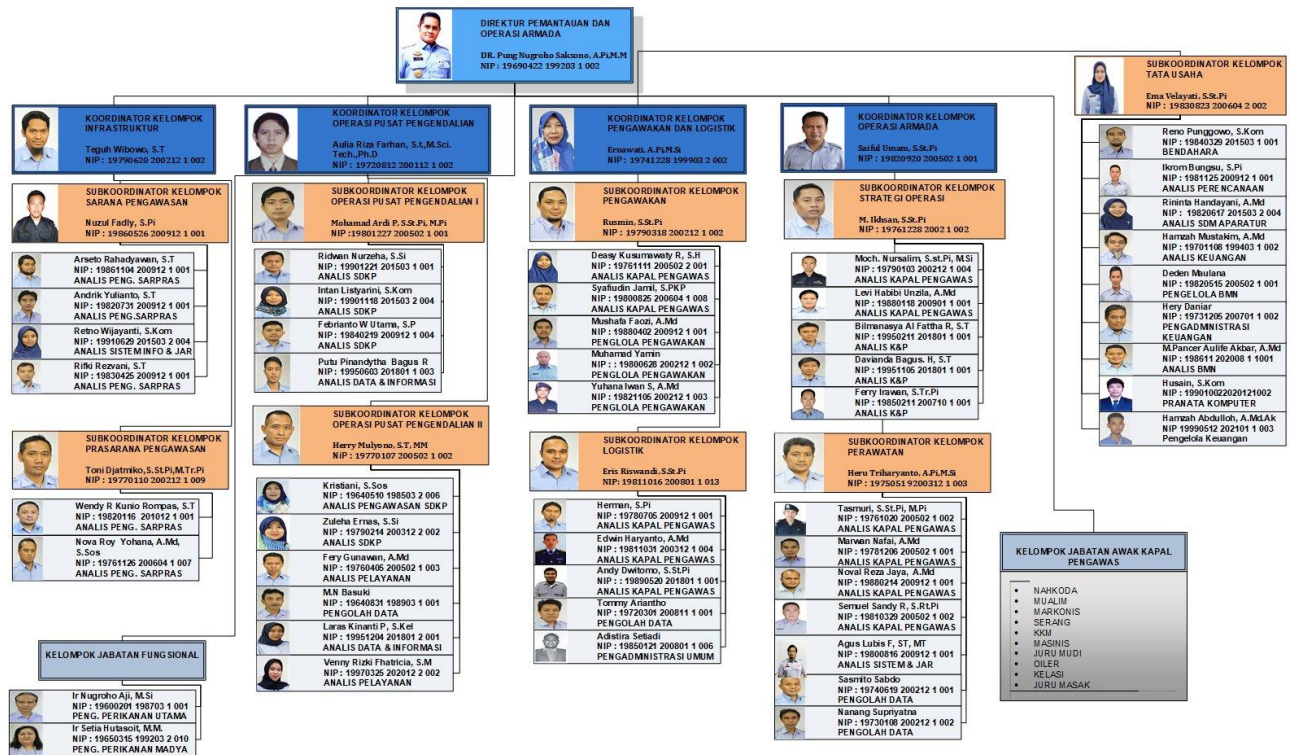
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut

seperti: *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking* / Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan besar bila bersinergi.

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

1. Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2022 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020-2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2022.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2022 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan II 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2022.

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional;
2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
3. Speedboat Pengawas;
4. Kapal Pengawas;
5. Operasi Pesawat Patroli;
6. Operasi Kapal Pengawas;
7. Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau;
8. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau;
9. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan;
10. NSPK Pemantauan dan Operasi Armada;
11. Layanan Perkantoran.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2022

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2022 terdiri atas 5 Sasaran Kegiatan

selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif (%)	90	%
2	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	Indeks
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	Indeks
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5	Indeks
		5	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	Indeks
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	60	%
		7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100	%
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	80	Indeks
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup	100	%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		Direktorat POA (%)		
		10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	Indeks
		11 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	%
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	90	Nilai
		13 Nilai implementasi program budaya Kerja (nilai)	21	Nilai
		14 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (inovasi)	1	Inovasi
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	75	%
		16 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	75	%
		17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	%
		18 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	%

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA tahun 2022 setelah penyesuaian dikarenakan Pandemi Covid-19 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	100.000.000
2	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.750.000.000
3	Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	750.000.000
4	Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	250.000.000
5	Operasi Kapal Pengawas	114.570.105.000
6	Operasi Pesawat Patroli	61.250.000.000
7	Kapal Pengawas	87.812.846.000
8	Speedboat Pengawas	8.978.070.000
9	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	51.016.879.000
10	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5.000.000.000
Anggaran Direktorat POA 2022		332.477.900.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan II 2022

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2022

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan II 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 111,33%** dengan indikator NPSS berwarna HIJAU . Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan II 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW II	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1 Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90	20	35,29	176,45
2	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	2 Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	40	43,33	108,33
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	3 Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	92	99,12	107,74
		4 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5	87,5	88,87	101,57
		5 Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	90	90	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6 Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	60	-	-	-
		7 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana	100	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW II	CAPAIAN	%	
		pengawasan SDKP (%)					
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan sistem pemantauan kapal perikanan (indeks)	80	80	92,01	115,01%
		9	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-	-
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	77	-	-	-
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	77	93,14	120,96
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (nilai)	90	-	-	-
		13	Nilai implementasi program budaya Kerja (nilai)	21	-	-	-
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayan publik (inovasi)	1	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW II	CAPAIAN	%	
	15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	75	-	-	-
	16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	75	-	-	-
	17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	86	86	99,31	115,48
	18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	70	70	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di bawah kendali pembinaannya. Salah satu *tools* yang digunakan adalah Laporan Pembinaan Pokmaswas dari DKP Provinsi yang dilengkapi dengan "form keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke setiap Provinsi terkait.

DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS". Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan menyesuaikan rencana aksi masing-masing Provinsi.

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	-	-	20	35,29	176,45	90	35,29	39.21

Pada periode yang sama tahun 2021, Indikator ini ditargetkan pengukurannya pada akhir tahun/triwulan IV 2021. Untuk tahun 2022 pengukuran target untuk indikator ini dimulai sejak triwulan II. Hal ini sebagai upaya dari Direktorat POA untuk memacu percepatan pencapaian target yang tentu akan diikuti dengan percepatan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Dinas KP Provinsi.

Pada triwulan II 2022 ditargetkan sebesar 20 persen dengan capaian sebesar 35,29 persen dengan persentase capaian sebesar 176,45 persen. Dengan demikian target kinerja organisasi yang ditetapkan pada triwulan II 2022 dapat dicapai dengan maksimal. Maksimalnya capaian tersebut karena Direktorat POA senantiasa melakukan pengawalan terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh masing-masing Provinsi. Pendampingan yang dilakukan terhadap masing-masing Provinsi berupa koordinasi via online berupa komunikasi via Whatsapp, telephone komunikasi, dan zoom, sementara via offline berupa kunjungan kedinasan ke lokasi pembinaan Pokmaswas atau kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dimaksud.

Sehubungan dengan perbedaan penentuan target per triwulan indikator kinerja dimaksud pada tahun 2021 dan 2022, maka untuk capaian pada periode triwulan II 2022, belum dapat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021. Perbandingan capaian baru dapat dilakukan pada periode triwulan IV 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP

2020-2024 yaitu sebesar 90 persen, realisasi ini baru mencapai 39.21 persen, oleh karena itu masih perlu upaya untuk dapat mencapainya sampai dengan akhir tahun 2024. Untuk memperoleh hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

RUMUS		
X	a b	x 100
Keterangan:		
x	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan POKMASWAS	
a	Jumlah provinsi yang melaporkan hasil pembinaan	
b	Jumlah DKP Provinsi yang wajib melaporkan	

PERHITUNGAN		
X	= a 12 b 34	x 100
35.29 %		
Keterangan:		
x	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan POKMASWAS	
a	Terdapat 12 provinsi yang melaporkan hasil pembinaan	
b	34 DKP Provinsi yang wajib melaporkan	

Hingga periode triwulan II 2022 terdapat 12 Provinsi yang telah aktif melaporkan kegiatan pembinaan POKMASWAS nya antara lain :

Tabel 6. Daftar Provinsi Aktif Melaporkan Pembinaan Pokmaswas Periode Triwulan II 2022

NO	PROVINSI	KETERANGAN
1	Aceh	Aktif
2	Sumatera Selatan	Aktif
3	Banten	Aktif
4	Jawa Barat	Aktif
5	Bali	Aktif
6	Nusa Tenggara Timur	Aktif
7	Kalimantan Utara	Aktif
8	Sulawesi Tenggara	Aktif
9	Gorontalo	Aktif
10	Maluku	Aktif

NO	PROVINSI	KETERANGAN
11	Maluku Utara	Aktif
12	Papua	Aktif

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp250.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp89.959.015,- atau 35,98% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks).

2

INDEKS PEMENUHAN DATA DAN ANALISIS HASIL PEMANTAUAN UNTUK OPERASI PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022		%	RENSTRA	
	T	R	T	R		T	R
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	40	48%	40	43,33	108,33	-	-

Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2021 realisasi capaian mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 sebesar 43,33 dengan persentase capaian sebesar 108,353%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II 2021, terdapat penurunan sebesar 4,67% dari yang sebelumnya sebesar 48%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh pemantauan terhadap kapal pengangkut ikan hidup baru dapat dilaksanakan pada Bulan Juni 2022 dikarenakan sebelumnya masih dalam proses peralihan perizinan kapal pengangkut ikan hidup yang sebelumnya berada di Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya menjadi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Realisasi untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra karena belum masuk di dalamnya sebagai target.

Rincian capaian per indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian capaian per Indikator

No	Indikator	Bulan			Bobot	TW II
		4	5	6		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	40	20
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	20	10
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	-	-	1	20	3,33
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	20	10
Indeks						43,33

Indikator kinerja diatas memiliki rincian sebagai berikut:

1. Indikasi Pelanggaran

Selain dari pemantauan tingkat keaktifan kapal dalam mengaktifkan transmiter, kapal juga dipantau pergerakannya agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama Triwulan II 2022, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 582 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 9. Indikasi Kapal Perikanan

No	Indikasi Pelanggaran	Bulan			Total
		Apr	Mei	Jun	
1	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	77	163	235	475
2	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	11	18	24	53
3	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	35	15	4	54
TOTAL		123	196	263	582

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II 2021, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2021 maupun 2022.

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU

31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada periode triwulan II 2022 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 13 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi

No.	Kawasan Konservasi	April	Mei	Juni
1	KKP BURUWAY, ARGUNI, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	8	7	8
2	KKP GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	0	0
3	KKP KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	9	13	6
4	KKP SAWO-LAHEWA DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	1	11	3
5	KKP SELAT BUNGA LAUT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DI PROVINSI SUMATERA BARAT	0	3	5
6	KKP3K KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	1	1
7	KKP3K PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU	0	3	0
8	KAWASAN KONSERVASI SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA	1	0	1
9	SAP KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	0	1	1
10	SAP KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	0	1	2

No.	Kawasan Konservasi	April	Mei	Juni
11	SAP KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	2	11	22
12	TNP LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	5	3
13	TWP KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	92	74	104

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II 2021, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2021 maupun 2022.

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada bulan Juni 2022 telah melakukan pemantauan terhadap 23 kapal pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Triwulan II 2022 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Pemenuhan analisis data pada periode Triwulan II 2022 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan Data untuk Ops Kapal Pengawas / *Airborne Surveillance*.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp5.000.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp1.607.885.196,- atau 32,16% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif" diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kinerja Operasi

Pesawat Patroli (indeks), (2) Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks), (3) Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP (indeks).

3

INDEKS KINERJA OPERASI PESAWAT PATROLI

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Pesawat Patroli	-	-	92	99,12	107,74	-	-	-

Indikator ini relatif baru yang merupakan hasil penyempurnaan dari IKU sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka belum dapat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2012. Hingga Triwulan II 2022 target kinerja IKU Indeks Kinerja Pesawat Patroli telah tercapai sebesar 99,12 persen dengan persentase capaian sebesar 107,74 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Dikarenakan IKU ini baru tahun 2022 maka untuk target pada Renstra 2024 belum terdapat target.

Selama periode operasi Triwulan II 2022 telah dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 98 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain : "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP".

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilaut antara lain :

1. Periode I : KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu Macan Tutul 02 dan KP. Paus 01.
2. Periode I-A : Operasi Mandiri.
3. Periode I-B : Operasi Mandiri.
4. Periode I-C : Operasi Mandiri.
5. Periode II : Operasi Mandiri.
6. Periode II-A : Operasi Mandiri.
7. Periode III Lanjutan : KP.Orca 01 dan KP. Orca 04.
8. Periode III-A : Operasi Mandiri.
9. Periode IIIB : Operasi Mandiri.
10. Periode III-C : Operasi Mandiri.
11. Periode III-D : Operasi Mandiri.
12. Periode III-D (RTE) : Operasi Mandiri.
13. Periode III-E : Operasi Mandiri.
14. Periode IV : KP.Orca 03, KP. Orca 01, KP. Orca 02, KP. Orca 04, KP. Paus 01, KP. Hiu Macan Tutul 01.
15. Periode IV-A : Operasi Mandiri
16. Periode V : KP. Hiu 15.
17. Periode VI : KP. Hiu 15.

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 12. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode VI 2022

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	6 – 25 Januari 2022	15	711, 571, 712, 713, 715, 573	144.428,8	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 11 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Rawai >30 GT KM. Soyo Lestari Rawai Dasar dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 12 Januari 2022

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
					Macan Tutul 02, KP. Paus 01	<p>terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Tetap Jaya 01 dengan status transmitter aktif;</p> <ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan tanggal 18 Januari 2022 terhadap 2 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Bintang Rejeki - V dan KM. Eka Cakra - 2, 4 Kapal Bouke Ami > 30 GT KM. Yama Toba - 05, KM. Harapan Baru, KM. Dian Jaya - I, KM. Mandiri - 08 dengan status transmitter aktif; Validasi ketaatan tanggal 22 Januari 2022 terhadap 12 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Bintang Timur, KM. Satria Perkasa, KM. Setia Rejeki, KM. Setia Jaya Makmur, KM. Setia Bhakti F, KM. Setia Mulya Jaya, KM. Setia Mulya Makmur, KM. Baruna Nusantara - 2, KM. Harapan Jaya Makmur, KM. Indah Jaya - I, KM. Indah Kail, KM.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>Tri Mina Prima dengan status transmitter aktif;</p> <ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan tanggal 23 Januari 2022 terhadap 1 Kapal Cumi >30 GT KM. Merauke Jaya, 1 Kapal Purse Seine > 30 GT KM. Khas dengan status transmitter aktif. Validasi ketaatan tanggal 25 Januari 2022 terhadap 2 Kapal Bouke Ami >30 GT KM. Sari Jati Mulya dan KM. Tan Jaya -7, 1 Kapal Penampung KM. Bandar Angkut Jaya-1 dengan status transmitter aktif.
I-A	7 & 16 Januari 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
I-B	27 - 30 Januari 2022	4	711	3054,9	OPERASI MANDIRI	<p>Tindak lanjut hasil pemantauan melalui matra udara adalah validasi kepatuhan 1 (satu) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Harapan Sentosa III, 1 (satu) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Surya - 6, 1</p>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						(satu) unit Kapal Rawai Dasar dengan nama lambung KM. Sumber Rejeki Berkembang - 2, dan 1 (satu) unit Kapal Bouke Ami dengan nama lambung KM. Mekar Alam Jaya - 8 dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
I-C	26 - 30 Januari 2022	2	711, 712	-	OPERASI MANDIRI	-
II	31 Januari & 5 Februari 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
II-A	9 - 24 Februari 2022	12	711, 572, 716, 713, 573	63.747,2	OPERASI MANDIRI	Validasi ketaatan tanggal 12 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Filadelfia - 02 dengan status transmitter aktif; Validasi ketaatan tanggal 13 Februari 2022 terhadap 4 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Perintis Samudra, KM. Tiga Saudara, KM. Sumber Jaya, KM. Chelsea Ratna Wijaya, dengan status transmitter aktif; Validasi ketaatan tanggal

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<p>21 Februari 2022 terhadap 3 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Halindo Utama, KM. Kasih Setia - XVI.A, Kasih Setia - IX dengan status transmitter aktif;</p> <p>Validasi ketaatan tanggal 22 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Bouke Ami >30 GT KM. Surya Terbit 7 dengan status transmitter aktif;</p>
III	25 Februari - 19 Maret 2022	15	571, 572, 573, 711, 712, 715, 716	154.298	KP ORCA 01, KP ORCA 04	<p>1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Jasa Mina Srikawit dengan status transmitter aktif; • Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 2 Kapal Pengangkut >30 GT KM. Sakti Bahagia dan KM. Karya Manggala Sakti dengan status transmitter aktif;

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan tanggal 26 Februari 2022 terhadap 1 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Marcel Jaya - 28 dengan status transmitter aktif • Validasi ketaatan tanggal 16 Maret 2022 terhadap 4 Kapal Purse Seine >30 GT KM. Garuda Jaya - I, KM. Cendrawasih Jaya 198, KM. Rajawali Jaya Baru dan KM. Bintang Surya 7 dengan status transmitter aktif; <p>2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat;</p> <p>3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas;</p>
IIIA	28 Februari - 1 Maret 2022	1	712	-	OPERASI MANDIRI	-
IIIB	6 - 11 Maret 2022 18 - 20 Maret 2022	6	715,573	13.104	OPERASI MANDIRI	-
IIIC	7 - 13 Maret 2022	6	715,712	-	OPERASI MANDIRI	-

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
IID	11 - 20 Maret 2022	3	712	-	OPERASI MANDIRI	-
IID (RTB)	20 Maret 2022	0	-	-	OPERASI MANDIRI	-
IIIE	15 Maret 2022	1	-	-	OPERASI MANDIRI	-
IV	21 - 27 Maret 2022 19 - 24 April 2022	11	713, 718, 712, 711	133.149	<p>KP. ORCA 03, KP. ORCA 01, KP. ORCA 02, KP. ORCA 04, KP. PAUS 01, KP. HIU MACAN TUTUL 01</p>	<p>1. Validasi kepatuhan 2 unit Kapal Cumi (Bouke Ami) dan 1 unit Kapal Cast Net (Jala Jatuh Berkawal) dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif. 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas; 3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal, Thailand, Vietnam, China dan Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas; 4. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya; 5. Pendaataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 712, 713, dan 718. 6. Telah Dilaksanakan</p>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						Dukungan Misi SAR di Sekitar Pulau Tior
IVA	23 - 24 Maret 2022	2	713	-	-	-
V	19 - 31 Mei 2022	12	711, 716, 715, 717, 718, 714, 713, 573	173.405	KP. HIU 15	<ol style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat, Waigeo, Perairan laut Aru bagian Tenggara, Perairan laut sawu, dan Perairan Kepulauan Kapoposang; Penerusan informasi keberadaan KIA Filipina dengan alat tangkap Purse Seine dan Pumpboat ke Kapal Pengawas HIU 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna;
VI	7 - 13 Juni 2022	5	712, 713, 714, 716	55.270,4	KP. HIU 15	<ol style="list-style-type: none"> Terpantau 8 KIA Light Boat, 7 KIA Purse Seine, 3 KIA Penampung, dan 23 FAD (Ponton) asal Filipina di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Hasil Pemantauan tersebut telah di teruskan kepada Kapal Pengawas Hiu 15 dan Stasiun PSDKP

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						Tahuna. 3. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
Total Hari Operasi		98	Total Coverage Area (NM²)	740.457,3		

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp61.250.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II 2022 telah terealisasi sebesar Rp26.993.799.359,- atau 44,07% dari total pagu.

4

INDEKS KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	87,5	88,87	101,57	89	88,87	99.85

Indikator ini merupakan indikator dengan penetapan target baru pada tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Hingga Triwulan II 2022 pencapaian kinerja IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar 88,87 dengan persentase capaian sebesar 101,57 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu 89 persen capaian tersebut baru mencapai 99.85 persen.

Selama periode triwulan II 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari operasi mandiri 30 Kapal Pengawas selama Triwulan II tahun 2022 sebanyak 1468 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 48 hari operasi.

Adapun hasil operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kapal Pengawas ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Triwulan II 2022

No.	Periode Operasi Kapal Pengawas	Hari Ops	Jam Ops	Riksa			Tangkap		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	Operasi Periode I (1 s.d 31 Januari 2022)	338	1642,9	270	4	274	18	4	22
2	Operasi Periode II (1 s.d 28 Februari 2022)	230	2544	288	2	290	5	0	5
3	Operasi Periode III (1 s.d 31 Maret 2022)	289	3693,2	564	2	566	27	2	29

No.	Periode Operasi Kapal Pengawas	Hari Ops	Jam Ops	Riksa			Tangkap		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
4	Operasi Periode IV (1 s.d 30 April 2022)	301	4835	964	0	964	14	0	14
5	Operasi Periode V (1 s.d 31 Mei 2022)	239	2526,84	291	3	294	1	0	1
6	Operasi Periode VI (1 s.d 30 Juni 2022)	71	1048,44	76	2	78	0	2	2
Jumlah		1468	16290.38	2453	13	2466	65	8	73

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp114.570.105.000,- dan sampai dengan Triwulan II 2022 telah terealisasi sebesar Rp85.855.732.272,- atau 74,94% dari total pagu.

5

INDEKS PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN SDKP

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel.

Logistik kapal terdiri dari :

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%).

Selama periode triwulan II 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Logistik KP Berupa BBM KP, Pelumas, Air Bersih, Ongkos Angkut, BBM Sea Rider / Rubber Boat;

2. Dukungan Logistik Berupa ATK, Bahan Komputer, Penjilidan Laporan, Jurnal Deck & Mesin, Buku PASUT, Biaya Pengiriman Laporan, Biaya Sewa DARDER KP. Akar Bahar, Komaliwan, dan Perdin Kegiatan Logistik;
3. Pemenuhan Logistik Awak Berupa Honor TKP, Jamuan Tamu, BPDT, Delegasi, Jaga Sandar, Perdin Konsultasi AKP Pusat, Natura (Bahan Makanan);
4. Pemenuhan Bahan Pemeliharaan Senpi, Perpanjangan Buku PAS Senpi, Pembaharuan Buku Pas SS1, Pembuatan Kartu Pengpin, Pembelian Munisi, Perdin Operasional Senpi dan Biaya Instruktur Bongkar Pasang senpi;
5. Perjalanan Dinas untuk Pembinaan dan Rotasi bagi Awak Kapal Pengawas;
6. Pengadaan Perlengkapan COVID 19, Biaya Tes Swab AKP, dan Fasilitas Isoman Untuk AKP;
7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Operasi Kapal Pengawas dengan melakukan Perjalanan Dinas penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban SPJ.

Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	90	90	100	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator dengan penetapan target baru pada tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Hingga Triwulan II 2022 pencapaian kinerja IKU Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar 90 dengan persentase capaian sebesar 100%.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP.

6

PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja "Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP" IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Hingga Triwulan II 2022 terdapat rencana Pengadaan Speedboat Pengawas sebanyak 2 (dua) unit dan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan *Multi Years Contract (MYC)*. Proses penyelesaian Pengadaan Speedboat sudah terlaksana 100% dan sudah dilakukan

peresmian pada pertengahan bulan maret 2022. Dan untuk Progres Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) hingga Minggu ke-13 (tanggal 24 s/d 30 Juni 2022) sebesar 0,2041% dari target 0,1287%.

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

7

PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2022.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP pada periode Triwulan II 2022 terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Perawatan Pencegahan (*Preventive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kerusakan dini (*preventive maintenance*) pada kapal. Perawatan rutin diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
2. Perawatan Prediktif (*Predictive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara memprediksi kerusakan yang akan timbul pada kapal pengawas, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk perawatan kapal pengawas yang bersifat periode. Perawatan prediktif diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
3. Perawatan Darurat (*Breakdown maintenance*) merupakan perawatan yang dilaksanakan dalam rangka menangani/memperbaiki kerusakan yang terjadi diatas kapal akibat kejadian yang tidak terduga (*unpredicted*), kegiatan perbaikan ini sangat

penting untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan yang lebih fatal. Perbaikan darurat dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga atau dengan cara swakelola sesuai batas kemampuan teknis yang dimiliki Awak Kapal Pengawas (AKP).

Rincian capaian IKU 7 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Hingga Triwulan II 2022 untuk IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

SASARAN KEGIATAN 5

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (4) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (6) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, (7) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik, (8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, (9) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA, (10) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (11) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

8

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan;

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan,
Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.
3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan,
Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja pelayanan publik.

Rincian capaian IKU 8 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	-	-	80	92,01	115,01	80	92,01	115,01

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP” periode Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 92,01 persen dari target sebesar 80 persen dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar 115,01 persen. Peningkatan terjadi pada setiap produk layanan dengan peningkatan terbesar pada produk layanan Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) sebesar 2,61. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen realisasi ini telah mencapai 115,01 persen, dengan demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra.

Rincian Perbandingan Hasil IKM Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan Hasil IKM

PRODUK LAYANAN	TRIWULAN II TAHUN 2021	TRIWULAN II TAHUN 2022
Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	90,38	92,99
Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	90,55	92,99
Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	87,62	90,05
Total	268,55	276,03
Rata-rata	89,52	92,01

Selama periode triwulan II 2022 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022 (Manado, 15 Juni 2022);
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPKP (Manado, 16 Juni 2022);

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp2.750.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.002.435.178,- atau 36,45% dari total pagu.

9

PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN NSPK BIDANG PENGAWASAN SDKP LINGKUP DIREKTORAT POA

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II 2022 progress masih dalam tahap penyusunan draft dan proses pengesahan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 100%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Alokasi anggaran Tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp100.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp.264.000,- atau 0,26% dari total pagu.

10

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT POA

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : ¹⁾

Kualifikasi; ²⁾ Kompetensi; ³⁾ Kinerja; dan ⁴⁾ Disiplin, dengan formula sebagai berikut:

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20 oj+Seminar)/3)
+ (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20 oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp)
+ (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20 oj+ Seminar)/3) + (NilaiSkp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

11

TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA BIMTEK LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). Direktorat POA telah melaksanakan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP Triwulan II Tahun 2022 pada Bulan Juni 2022 di Manado dengan peserta sebanyak 35 orang pengguna Layanan SPKP.

Rincian capaian IKU 11 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan II 2022

INDIKATOR	TW II 2021	TW II 2022	RENSTRA 2020-2024
-----------	------------	------------	-------------------

KINERJA	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	-	-	77	93,14	120,96	80	93,14	116.42

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77 persen. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 adalah sebesar 93,14 persen dari target sebesar 77 persen dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar 120,96 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen, realisasi telah ini telah melampaui target yaitu mencapai 116.42 persen. Namun demikian masih perlu dilakukan upaya mempertahankan capaian agar dapat konsisten hingga periode akhir Renstra.

12

NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi.

Rekonsiliasi Kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkalit pelaporan kinerja.

Rincian capaian IKU 12 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 90%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

13

NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2022, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari :

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- Target nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Rincian capaian IKU 13 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

14

UNIT YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Rincian capaian IKU 14 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

15

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Rincian capaian IKU 15 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 26. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat	-	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
POA								

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 75%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

16

TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Rincian capaian IKU 16 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 27. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator yang dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II 2021. Pada tahun 2022, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 75%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2022.

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

- a. Keikutsertaan
Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV
- b. Dokumen
Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain : Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja
- c. Keaktifan
Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who (tentang siapa), What (Apa yang terjadi), Where (dimana peristiwa terjadi), When (kapan peristiwa terjadi), Why (mengapa hal itu terjadi), dan How (bagaimana hal itu terjadi).*

Rincian capaian IKU 17 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat POA	84	97,92	86	99,31	115,48	90	99,31	110.34

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2021 realisasi capaian meningkat dan melampaui dari target yang ditetapkan, dengan hasil capaian kinerja untuk periode Triwulan II 2022 sebesar 99,31 persen dengan realisasi 115,48 persen. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase

Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 90 persen, realisasi ini sesungguhnya telah melampaui target yaitu sebesar 99.31 persen. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya mempertahankan capaian tersebut sampai dengan periode akhir Renstra.

18

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Rincian capaian IKU 18 Direktorat POA periode Triwulan II 2022 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan II 2022

INDIKATOR KINERJA	TW II 2021		TW II 2022			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	65	100	70	70	100	80	70	87.50

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2021 realisasi capaian relatif sama yaitu tercapai 100%. Realisasi capaian indikator ini pada triwulan II 2022 dipenuhi sebanyak 70 persen dikarenakan berdasarkan manual IK dijelaskan bahwa untuk Satker yang tidak terdapat target Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi hasil pengawasan, maka target dianggap tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen, realisasi ini baru mencapai 87.50 persen, oleh karena itu masih perlu upaya untuk dapat mencapainya sampai dengan akhir tahun 2024.

REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS SUMBER DAYA

Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Triwulan II 2022 telah melaksanakan 10 Rincian Rutput (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2022. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp316.080.010.000 (tiga ratus enam belas miliar delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp332.477.900.000 (tiga ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan II 2022 adalah sebesar **Rp 175,836,878,956** atau **52,89%** dari pagu **Rp 332,477,900,000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 lebih tinggi, realisasi Triwulan II 2021 sebesar **Rp. 76,132,444,288** hal ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat POA seperti melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta proses pembayaran pembangunan fisik Kapal Pengawas Kelas II. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses administrasi keuangan, sehingga target 50 persen realisasi keuangan pada periode 30 Juni 2022 dapat tercapai bahkan melampaui target.

Tabel 30. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 30 Juni 2022

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	100.000.000	264.000	0,26%	99.736.000	99,74%
Layanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	2.750.000.000	1.002.435.178	36,45%	1.747.564.822	63,55%
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang dipantau	750.000.000	313.975.333	41,86%	436.024.667	58,14%
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang di pantau	250.000.000	89.959.015	35,98%	160.040.985	64,02%

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Operasi Kapal Pengawas	114.570.105.000	85.855.732.272	74,94%	28.714.372.728	25,06%
Operasi Pesawat Patroli	61.250.000.000	26.993.799.359	44,07%	34.256.200.641	55,93%
Kapal Pengawas	87.812.846.000	38.750.043.791	44,13%	49.062.802.209	55,87%
Speedboat Pengawas	8.978.070.000	8.919.157.564	99,34%	58.912.436	0,66%
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	51.016.879.000	12.303.627.248	24,12%	38.713.251.752	75,88%
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5.000.000.000	1.607.885.196	32,16%	3.392.114.804	67,84%
TOTAL	332.477.900.000	175.836.878.956	52,89%	156.642.221.044	47,11%

Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Triwulan I 2022

Dalam rangka melakukan rekomendasi pada dokumen Laporan Kinerja periode Triwulan I 2022, telah dilakukan beberapa tindaklanjut yaitu:

- Rekomendasi Tindak Lanjut 1:** melakukan penyesuaian rencana penarikan dana sesuai dengan revisi anggaran.

Telah dilakukan revisi atau penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) langsung pada aplikasi SAKTI Satker Direktorat POA menyesuaikan perubahan pagu anggaran dengan tangkapan layar sebagai berikut:

Kode	Uraian	Jumlah Pagu	Jumlah Rencana
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	332.477.900.000	332.477.900.000
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	332.477.900.000	332.477.900.000
2350.0151.00.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	100.000.000	100.000.000
2350.AFA.001	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	100.000.000	100.000.000
> 051	Persiapan Penyusunan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	16.800.000	16.800.000
> 052	Penyusunan NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	66.200.000	66.200.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	17.000.000	17.000.000
2350.0151.00.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	2.750.000.000	2.750.000.000
2350.BAB.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.750.000.000	2.750.000.000
> 051	Persiapan/Perencanaan Pelayanan Publik SKAT	1.656.682.000	1.656.682.000
> 052	Pelaksanaan pelayanan publik SKAT	1.026.618.000	1.026.618.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi pelayanan publik SKAT	66.700.000	66.700.000
2350.0151.00.BKB	Pemantauan produk	1.000.000.000	1.000.000.000
2350.BKB.011	Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	750.000.000	750.000.000
> 051	Perencanaan Supervisi dan BIMTEK Pemantauan, Operasi Armada dan Pembangunan Infrastruktur	206.764.000	206.764.000
> 053	Pelaksanaan Supervisi Pemantauan, Operasi Armada dan Pembangunan Infrastruktur pemantauan, Operasi Armada dan Pembangunan Infrastruktur	310.236.000	310.236.000
> 054	Monitoring, Evaluasi Supervisi dan BIMTEK Operasi Armada dan Peningkatan Infrastruktur	233.000.000	233.000.000
2350.BKB.012	Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	250.000.000	250.000.000
> 051	Perencanaan Layanan Pemantauan Operasional Pembinaan POKMASWAS	49.000.000	49.000.000
> 052	Pelaksanaan Layanan Pemantauan Operasional Pembinaan POKMASWAS	191.470.000	191.470.000
> 053	BIMTEK, Monitoring dan Evaluasi pembinaan POKMASWAS	9.530.000	9.530.000

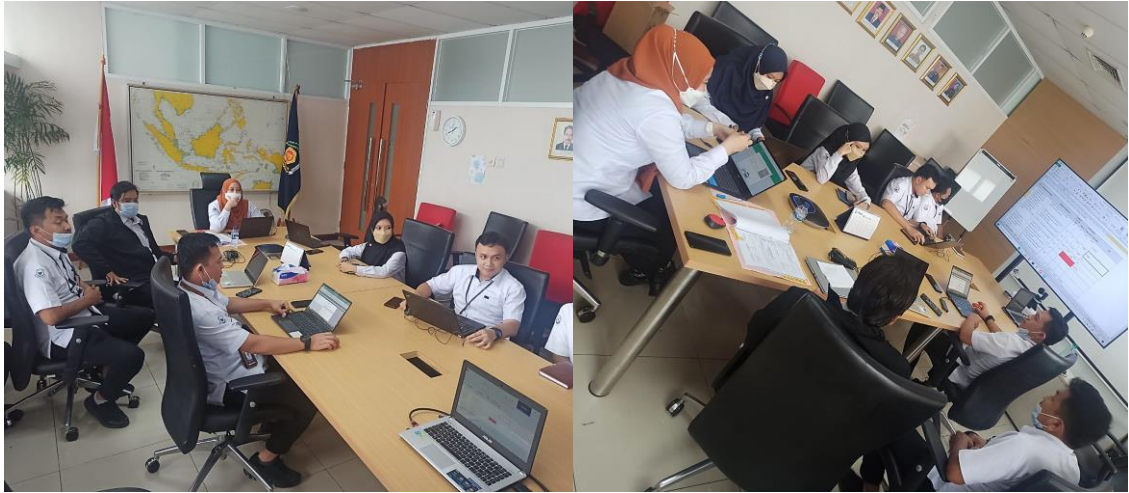
2350.0151.00.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	175.820.105.000	175.820.105.000
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	114.570.105.000	114.570.105.000
> 051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	144.140.000	144.140.000
> 052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	110.614.556.000	110.614.556.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas	3.811.409.000	3.811.409.000
2350.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli	61.250.000.000	61.250.000.000
> 051	Perencanaan Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara	23.400.000	23.400.000
> 052	Operasional Pengawasan SDKP Melalui Udara	61.214.000.000	61.214.000.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Pengawasan SDKP Melalui Udara	12.600.000	12.600.000
2350.0151.00.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	96.790.916.000	96.790.916.000
2350.RAL.001	Kapal Pengawas	87.812.846.000	87.812.846.000
> 051	Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas	2.704.096.000	2.704.096.000
> 052	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	84.705.250.000	84.705.250.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	403.500.000	403.500.000
2350.RAL.002	Speedboat Pengawas	8.978.070.000	8.978.070.000
> 052	Pengadaan Speedboat Pengawas Perikanan	8.852.505.000	8.852.505.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Speedboat Pengawas	125.565.000	125.565.000
2350.0151.00.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56.016.879.000	56.016.879.000
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	51.016.879.000	51.016.879.000
> 051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	614.100.000	614.100.000
> 052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	49.847.479.000	49.847.479.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	555.300.000	555.300.000
2350.RCG.002	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5.000.000.000	5.000.000.000
> 051	Perencanaan Operasional Sistem Pemantauan SDKP	5.250.000	5.250.000
> 052	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP	4.946.075.000	4.946.075.000
> 053	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemantauan SDKP	48.675.000	48.675.000

Sumber : Aplikasi SAKTI Modul Perencanaan

2. Rekomendasi Tindak Lanjut 2: Melakukan rapat evaluasi bulanan terkait dengan progres pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan capaian kinerja.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi kedua, Direktorat POA telah melakukan rapat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan anggaran dan kinerja serta melakukan konfirmasi capaian kinerja pada masing-masing koordinator kelompok lingkup Direktorat POA selaku penanggungjawab kegiatan. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 bertempat di Ruang Rapat Hiu Macan, Direktorat POA Gedung Mina Bahari IV, lantai 12 Jakarta Pusat. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Konfirmasi capaian kinerja pada 9 indikator yang dilakukan pengukuran;
2. Pemeriksaan data dukung pada 9 indikator yang dilakukan pengukuran;
3. Konfirmasi Realisasi anggaran;
4. Pembahasan kendala dan tindaklanjut capaian kinerja.



Gambar 2. *Rapat Evaluasi Berkala Capaian Kinerja Lingkup Direktorat POA Periode Triwulan II 2022*

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- Data capaian kinerja Sasaran Kegiatan POA
- Data capaian atas pelaksanaan Klasifikasi Rincian Output (KRO)
- Data alokasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO)
- Data realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kinerja 5 Sasaran Kegiatan dibandingkan dengan realisasi anggaran KRO yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan:

Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Direktorat POA Periode Triwulan II 2022

Sasaran Kegiatan		Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)**	Realisasi (Rp)***	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
SK 01	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	120.00	250,000,000	89,959,015	35.98%	-0,69%
SK 02	Terselenggaranya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	108.33	7,750,000,000	3,215,770,392	41,49%	-1,42%
SK 03	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	103.10	175,820,105,000	112,849,531,631	64.18%	-5.43%
SK 04	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan		148,557,795,00	60,286,803,936	40.58%	29,53%
SK 5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	113.88	100,000,000	264,000	0,26%	-0.26%
Jumlah		111.33	332,477,900,000	175,836,878,956	52,89%	21,72%

Sumber:

*Aplikasi Kinerjaku

**Aplikasi Kinerja Bappenas

***Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja Direktorat POA periode Triwulan II 2022 adalah sebesar 111.33 persen, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 13.90 persen yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja. Namun demikian capaian ini masih bersifat sementara mengingat pelaksanaan kegiatan dan anggaran masih terus berjalan.

Selain itu selama satu semester 2022 ini, dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas anggaran melalui *Automatic Adjustment (AA)* anggaran

Direktorat POA telah melakukan AA terhadap kegiatan prioritas yang dilakukan melalui efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya dengan skema reformulasi ulang. Hingga triwulan II 2022 ini, Direktorat POA telah melakukan AA anggaran sebanyak dua kali dalam rangka memenuhi permintaan Kementerian Keuangan dalam rangka antisipasi terhadap kebutuhan fiskal Negara. Direktorat POA terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

2. Optimalisasi Kinerja Operasi Pesawat Patroli Udara/*Airborne Surveillance* Untuk Menghemat Pemakaian BBM Kapal Pengawas

Dalam rangka optimalisasi kinerja operasi armada kapal pengawas, Pesawat patroli udara melakukan pemantauan target kapal-kapal dan wilayah konservasi perairan, selanjutnya data hasil validasi yang memuat identitas kapal, foto kapal dan posisi kapal dikirimkan ke pusat komando operasi dan armada kapal pengawas. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena operasi dilakukan berdasarkan target operasi yang jelas.

3. Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui *Zoom Meeting*

Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Lingkup Direktorat POA mencakup satker pusat dan UPT, pertemuan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala melalui zoom meeting. Selanjutnya, pemantauan perkembangan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh dilakukan melalui supervisi/pendampingan/pembinaan secara daring, termasuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan II 2022

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan II 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Triwulan II 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan,
2. Total IKU dan IK Direktorat POA tahun 2022 sebanyak 18 IKU, Target pencapaian untuk periode Triwulan II 2022 sebanyak 9 IK/IKU, Dari target 9 IKU/IK tersebut sebanyak 9 IKU/IK telah tercapai sesuai rencana dan 9 IKU/IK yang belum dicapai akan dilakukan pengukuran capaian kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2022.
3. Dari 9 Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II 2022 Terdapat 3 indikator yang belum mencapai target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu antara lain: (1) Tingkat keaktifan dalam pembinaan Pokmaswas baru tercapai 39.21 persen target dari target 100 persen; (2) Tingkat Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas baru tercapai 99.85 persen dari target 100 persen; (3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan, baru tercapai 87.5 persen dari target 100 persen.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<p>a) Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>b) Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.</p>	<p>a) Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA.</p> <p>b) Melakukan rapat khusus pada periode triwulan III 2022 untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024.</p>

IKU TINGKAT KEAKTIFAN PROVINSI DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

No	Provinsi	LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN
1	Aceh	√
2	Sumatera Utara	-
3	Sumatera Barat	-
4	Sumatera Selatan	√
5	Jambi	-
6	Bengkulu	-
7	Lampung	-
8	Riau	-
9	Kepulauan Riau	-
10	Kepulauan Bangka Belitung	-
11	Banten	√
12	DKI Jakarta	-
13	Jawa Barat	√
14	Jawa Tengah	-
15	Jawa Timur	-
16	DI Yogyakarta	-
17	Bali	√
18	Nusa Tenggara Barat	-
19	Nusa Tenggara Timur	√
20	Kalimantan Utara	√
21	Kalimantan Tengah	-
22	Kalimantan Selatan	-
23	Kalimantan Timur	-
24	Kalimantan Barat	-
25	Sulawesi Utara	-
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tengah	-
28	Sulawesi Tenggara	√
29	Sulawesi Selatan	-
30	Gorontalo	√
31	Maluku	√
32	Maluku Utara	√
33	Papua	√
34	Papua Barat	-
Total		12

*** perhitungan IKU**

target	20
realisasi capaian (12 provinsi /34 provinsi)	35,29%
% capaian	176,45%

Koordinator Operasi Pusat Pengendalian

Aulia Riza Farhan

INDEKS PEMENUHAN DATA ANALISIS SPKP

No	Indikator	Bulan												Bobot	Perhitungan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1								40	20
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1								20	10
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1					1								20	3,33333333
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1								20	10
Indeks																43,33333333

Koordinator Operasi Pusat Pengendalian



Aulia Riza Farhan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor: 794 / PSDKP.2 / TA.140/VIII/2022

Yth. : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Dari : Koordinator Kelompok Operasi Armada
Hal : Capaian Indikator Kinerja Lingkup Operasi Armada TW II Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 4 Juli 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan **Periode Triwulan II Tahun 2022**, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja lingkup Operasi Armada sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Capaian	%
1	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks)	92	92	99.12	107.74
2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	87.5	87.5	88.87	101.56
3	Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	Tidak ada target TW II		

Detail capaian Indikator Kinerja sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Saiful Umam

Lampiran Surat

Nomor

: 794 / PSDKR 2 / Tu.140 / VII / 2022

Tanggal

: 4 Juli 2022

**Rincian Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli
Periode Triwulan II Tahun 2022**

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai
1	Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau (20%)	1000	1156	20
2	Persentase Coverage Area Pengawasan (20%)	35%	38.40%	20.00
3	Persentase Capaian Hari Operasi (20%)	75	98	20
4	Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan (15%)	17	17	15
5	Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi (5%)	85	70	4.12
6	Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717) (5%)	4	4	5
7	Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi (5%)	5	5	5
8	Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional (5%)	0	0	5
9	Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan) (5%)	2	2	5
Total Nilai				99.12

Rincian Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli
Periode Triwulan II Tahun 2022

1 Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau (20%)

No	Periode	Hasil Pemantauan																					
		Kapal Asing	Rawai	Kapal Penampung	Kapal Cumi	Kapal Bagan	Pukat Tarik			Pukat Hela			Pole and Line	Purse Seine	Pancing Utur / Handline	Long Line	Boke Ami	Gill Net	Kapal ABPI Telur	Castnet	Bagan	Rumpon	
							Cantrang	Dogol	Lampara Dasar	Otter Trawl	Pair Trawl	Pukat Udang											Trawl
1	I	6	4	4			89			92			36		36	55	2	19				88	47
2	I - A																						
3	I-B		6		27		1			4					8	14		46					
4	I-C																						
5	II																						
6	II-A		6			6				52				1	31	27		1	1				
7	III	5		2			30			61			16		31	13		4					1
8	III-A																						
9	IIIB														4	4							
10	IIIC																						
11	IIID																						
12	III-D (RTB)																						
13	IIIE																						
14	IV	13	19				7			11		2	5		31		1	50	2		10		1
15	IVA																						
16	V	12	16	3											11	31	2	17		44			18
17	VI	18		1			4							5	15	58		12	6		6	315	52
Jumlah		54	51	10	27	6	131	0	0	220	0	2	57	6	167	202	5	149	9	44	16	403	119
Jumlah Kapal Perikanan Terpantau		1156																					
Jumlah ABPI Terpantau		522																					

2 Persentase Coverage Area Pengawasan (20%)

No	Periode	TMT Operasi	Sektor	Hari Ops	Jam Ops	Jarak Pemantauan (NM)	Coverage Area (NM2)	Keterangan	
1	I	6 - 25 Januari 2022	711, 571, 712, 713, 573	15	64,62	9026,8	144428,8	Patroli	
2	I - A	7 & 16 Januari 2022	712	1	5,51	-	-	Patroli dan Dukungan	
3	I-B	27 - 30 Januari 2022	711	4	16,95	190,93125	3054,9	Patroli	
4	I-C	26 - 30 Januari 2022		2	10,9	-	-	Patroli dan Dukungan	
5	II	31 Januari & 5 Februari 2022	712	1	9,92	-	-	Dukungan	
6	II-A	9 - 24 Februari 2022	711, 572, 716, 713, 573	12	47,95	3984,2	63747,2	Patroli	
7	III	25 Februari - 19 Maret 2022	571, 572, 573, 711, 712, 715, 716	15	69	9643,625	154298	Patroli	
8	III-A	28 Februari - 1 Maret 2022	712	2	7,02	-	-	Dukungan	
9	IIIB	6 - 11 Maret 2022 18 - 20 Maret 2022	715, 573	6	31	819	13104	Patroli	
10	IIIC	7 - 13 Maret 2022	715 & 712	6	21,12	-	-	Dukungan	
11	IIID	11 - 20 Maret 2022	712	3	15,2	-	-	Patroli dan Dukungan	
12	III-D (RTB)	11 Maret 2022	712	0	1,58	-	-	Dukungan	
13	IIIE	24 Maret 2022		1	1,8	-	-	Dukungan	
14	IV	21 - 27 Maret 2022 19 - 24 April 2022	713, 718, 712, 711	11	54,67	8321,8125	133149	Patroli	
15	IVA	23 - 24 Maret 2022	713	2	7,82	-	-	Patroli dan Dukungan	
16	V	19 - 31 Mei 2022	711, 716, 715, 717, 718, 714, 713, 573	12	59,75	10837,8125	173405	Patroli	
17	VI	7 - 13 Juni 2022	WPPNRI 712, 713, 714, 716	5	25,07	3454,4	55270,4	Patroli	
							Jumlah	740.457	NM2
							Luas WPPNRI	1.928.506	NM2
							%Coverage	38,40%	

3 Persentase Capaian Hari Operasi (20%)

No	Periode	TMT Operasi	Sektor	Hari Ops
1	I	6 - 25 Januari 2022	711, 571, 712, 713, 573	15
2	I - A	7 & 16 Januari 2022	712	1
3	I-B	27 - 30 Januari 2022	711	4
4	I-C	26 - 30 Januari 2022		2
5	II	31 Januari & 5 Februari 2022	712	1
6	II-A	9 – 24 Februari 2022	711, 572, 716, 713, 573	12
7	III	25 Februari - 19 Maret 2022	571, 572, 573, 711, 712, 715, 716	15
8	III-A	28 Februari - 1 Maret 2022	712	2
9	IIIB	6 - 11 Maret 2022 18 - 20 Maret 2022	715, 573	6
10	IIIC	7 - 13 Maret 2022	715 & 712	6
11	IIID	11 - 20 Maret 2022	712	3
12	III-D (RTB)	11 Maret 2022	712	0
13	IIIE			1
14	IV	21 - 27 Maret 2022 19 - 24 April 2022	713, 718, 712, 711	11
15	IVA	23 - 24 Maret 2022	713	2
16	V	19 - 31 Mei 2022	711, 716, 715, 717, 718, 714, 713, 573	12
17	VI	7 - 13 Juni 2022	WPPNRI 712, 713, 714, 716	5
Jumlah				98

4 Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan (15%) - Berdasarkan Fokus Operasi

No	Periode	TMT Operasi	Sektor	Fokus Operasi	Hasil/Tindak Lanjut	Tercapai/Tidak
1	I	6 - 25 Januari 2022	711, 571, 712, 713, 573	1. Operasional Kapal Ikan Asing di WPPNRI 711 dan 571 2. Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 711, 571, 712, 713, 715, 573 3. Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 573, 713, 715 4. Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP	Tindak lanjut hasil pemantauan melalui mata udara aduan validasi kepatuhan 1 unit Kapal Rawai, 16 unit Kapal Purse Seine, 7 unit Kapal Bouke Ami, 1 unit kapal penampung dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.	Tercapai
2	I - A	7 & 16 Januari 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
3	I-B	27 - 30 Januari 2022	711	1. Operasional Kapal Ikan Asing di WPPNRI 711 2. Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 711 3. Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 711 4. Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP	Validasi kepatuhan 1 (satu) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Harapan Sentosa III, 1 (satu) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Surya - 6, 1 (satu) unit Kapal Rawai Dasar dengan nama lambung KM. Sumber Rejeki Berkembang - 2, dan 1 (satu) unit Kapal Bouke Ami dengan nama lambung KM. Mekar Alam Jaya - 8 dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.	Tercapai
4	I-C	26 - 30 Januari 2022		Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
5	II	31 Januari & 5 Februari 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
6	II-A	9 - 24 Februari 2022	711, 572, 716, 713, 573	• Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 711, 572, 716, 713, 573 • Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 573, 572, 713 • Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP • Dukungan Kegiatan Pimpinan	1. Tindak lanjut hasil pemantauan melalui mata udara aduan validasi kepatuhan 8 unit Kapal Purse Seine, 1 unit Kapal Bouke Ami, 7 unit Kapal Bouke Ami dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif. 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Pulau Kalao dan Bonerate, Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu, dan TN Komodo.	Tercapai
7	III	25 Februari - 19 Maret 2022	572, 573, 711, 712, 715	• Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 571, 572, 573, 711, 712, 715, 716 • Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 573, 572, 713 • Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP • Validasi Kegiatan Jaring Arafura Tahun 2022 • Dukungan Misi SAR di Sekitar Pulau Tior	1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) 6 Kapal Purse Seine, dan 2 Kapal Pengangkut 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat; 3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas;	Tercapai
8	III-A	28 Februari - 1 Maret 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dukungan pimpinan secara langsung	Tercapai
9	IIIB	6 - 11 Maret 2022 18 - 20 Maret 2022	715, 573	• Operasional Kapal Ikan Indonesia >30 GT di WPPNRI 713, 573 • Dukungan kegiatan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan	1. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPP 715, 573 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat 3. Dukungan Kegiatan Pimpinan	Tercapai
10	IIIC	7 - 13 Maret 2022	715 & 712	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
11	IIID	11 - 20 Maret 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
12	III-D (RTB)	11 Maret 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
13	IIIE			Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
14	IV	21 - 27 Maret 2022 19 - 24 April 2022	713, 718, 712, 711	1. Operasional Kapal Ikan Asing di WPPNRI 711 2. Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 711, 712, 713, 718 3. Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 718 4. Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP 5. Validasi Kegiatan Jaring Arafura Tahun 2022 6. Dukungan Misi SAR di Sekitar Pulau Tior	1. Validasi kepatuhan 2 unit Kapal Cumi (Bouke Ami) dan 1 unit Kapal Cast Net (Jala Jatuh Berkawal) dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif. 2. Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas; 3. Penerusan informasi keberadaan KIA asal, Thailand, Vietnam, China dan Malaysia dengan alat tangkap Trawl ke Kapal Pengawas; 4. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya; 5. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 712, 713, dan 718.	Tercapai

15	IVA	23 - 24 Maret 2022	713	Dukungan Kegiatan Pimpinan	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	Tercapai
16	V	19 - 31 Mei 2022	6, 715, 717, 718, 714, 7573	<ul style="list-style-type: none"> Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 711, WPPNRI 713, WPPNRI 716, WPPNRI 715, WPPNRI 717, WPPNRI 718 dan WPPNRI 573 Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 713, 716, dan 7573 Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP Dukungan Kegiatan Pimpinan Dukungan Misi SAR di Sekitar Selat Makassar 	<ol style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); Pemantauan Kawasan Konservasi Raja Ampat, Waigeo, Perairan laut Aru bagian Tenggara, Perairan laut sawu, dan Perairan Kepulauan Kapoposang; Penerusan informasi keberadaan KIA Filipina dengan alat tangkap Purse Seine dan Pumpboat ke Kapal Pengawas HIU 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna; Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya; Pendaataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 713, 714, 715, 716, 717 718, dan 573 	Tercapai
17	VI	7 - 13 Juni 2022	PPNRI 712, 713, 714, 716	<ul style="list-style-type: none"> Operasional Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 712, 713, 714, dan 716 Operasional Kapal Ikan Asing di WPPNRI 716 Alat Bantu Penangkapan Ikan (FAD) di 713 dan 716 Validasi Ketaatan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP Dukungan Kegiatan Pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> Terpantau 8 KIA Light Boat, 7 KIA Purse Seine, 3 KIA Penampung, dan 23 FAD (Ponton) asal Filipina di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil Pemantauan tersebut telah di teruskan kepada Kapal Pengawas Hiu 15 dan Stasiun PSDKP Tahuna. Validasi 3 Kapal Gill Net >30GT dengan nama lambung KM. Amangkurat – 5, KM. Angsal Jaya Mulya E, dan KM. Sukses Abadi Baru dengan status transmitter aktif pada tanggal 7 Juni 2022; Validasi 1 Kapal Purse Seine >30GT dengan nama lambung KM. Soyo Lumintu dengan status transmitter aktif pada tanggal 10 Juni 2022; Validasi 5 Kapal Purse Seine >30GT dengan nama lambung KM. Kurnia Barokah 02, KM. Bintang Mas Union, KM. Usrok I, KM. Harmoni 2, dan KM. Buana Mulya 3; 1 unit Kapal Cast Net >30GT dengan nama lambung KM. Sumber Mas Jaya dan 2 unit Kapal Gill Net dengan nama lambung KM. Rizki Mina Samudra dan KM. Kapa Sinar Mandiri dengan status transmitter aktif. 	Tercapai

5 Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi (5%)

No	Periode	TMT Operasi	Sektor	Hasil/Tindak Lanjut	Jumlah Kapal yang Divalidasi
1	I	6 - 25 Januari 2022	711, 571, 712, 713, 573	Tindak lanjut hasil pemantauan melalui mata udara adalah validasi kepatuhan 1 unit Kapal Rawai, 16 unit Kapal Purse Seine, 7 unit Kapal Bouke Ami, 1 unit kapal penampung dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.	25
2	I - A	7 & 16 Januari 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	0
3	I-B	27 - 30 Januari 2022	711	Validasi kepatuhan 1 (satu) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Harapan Sentosa III, 1 (satu) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Surya – 6, 1 (satu) unit Kapal Rawai Dasar dengan nama lambung KM. Sumber Rejeki Berkembang – 2, dan 1 (satu) unit Kapal Bouke Ami dengan nama lambung KM. Mekar Alam Jaya – 8 dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.	4
4	I-C	26 - 30 Januari 2022		Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	0
5	II	31 Januari & 5 Februari 2022	712	Dukungan Kegiatan Pimpinan telah dilaksanakan	0
6	II-A	9 – 24 Februari 2022	711, 572, 716, 713, 573	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil pemantauan melalui mata udara adalah validasi kepatuhan 8 unit Kapal Purse Seine, 1 unit Kapal Bouke Ami, 7 unit Kapal Bouke Ami dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif. Pemantauan Kawasan Konservasi Pulau Kalao dan Benawa. Pemantauan Kawasan Konservasi Laut Sawu. 	16

6 Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717)

No	WPPNRI	Pelaksanaan Pengawasan	Tercapai (Ya/Tidak)
1	571	Periode I dan Periode III	Ya
2	711	Periode I, I-B, II-A, III, IV, dan V	Ya
3	716	Periode II-A, III, V, dan VI	Ya
4	717	Periode V	Ya

7 Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi (5%)

Sepanjang Periode Triwulan II Tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan di 5 KKPN, yakni KKPN Laut Sawu, TWP Anambas, TWP Raja Ampat, Laut Banda, TWP Padaido

8 Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional (5%)

Belum ada misi Kegiatan Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional

9 Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan) (5%)

No	Periode Operasi	Misi SAR
1	Periode IV MPA ATR 42-320	Misi SAR 8 orang speedboat tenggelam di WPPNRI 718 Perairan Seram, Maluku tanggal 25 Maret 2022
2	Periode V MPA ATR 42-320	Misi SAR KM. Ladang Pertiwi 02 di WPPNRI 713 Perairan Pangkajene Sulsel tanggal 30 Mei 2022

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal : Juli 2022

**Rincian Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas
Periode Triwulan II Tahun 2022**

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	120	75	12.5
2	KP. ORCA 02	120	220	20
3	KP. ORCA 03	120	83	13.83
4	KP. ORCA 04	120	83	13.83
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	100	140	20
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	100	121	20
7	KP. PAUS 01	100	100	20
8	KP. AKAR BAHAR 01	80	11	2.75

2. Persentase Coverage Area Pengawasan;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	1.2	1.31	15
2	KP. ORCA 02	1.2	2.28	15
3	KP. ORCA 03	1.2	1.10	13.75
4	KP. ORCA 04	1.6	1.66	15
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	0.7	1.03	15
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	0.3	0.40	15
7	KP. PAUS 01	0.26	0.35	15
8	KP. AKAR BAHAR 01	0.02	0.02	14

3. Persentase Capaian Hari Operasi;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	60	65	15
2	KP. ORCA 02	60	88	15
3	KP. ORCA 03	60	54	13.5
4	KP. ORCA 04	60	78	15

5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	50	67	15
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	50	75	15
7	KP. PAUS 01	50	81	15
8	KP. AKAR BAHAR 01	40	61	15

4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	0	0	10
2	KP. ORCA 02	0	0	10
3	KP. ORCA 03	0	0	10
4	KP. ORCA 04	0	0	10
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	0	0	10
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	0	0	10
7	KP. PAUS 01	0	0	10
8	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	10

5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	4	1	2.5
2	KP. ORCA 02	6	6	10
3	KP. ORCA 03	6	1	1.67
4	KP. ORCA 04	6	1	1.67
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	5	1	2
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	5	2	4
7	KP. PAUS 01	5	11	10
8	KP. AKAR BAHAR 01	4	0	0

6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	0	0	10
2	KP. ORCA 02	0	0	10
3	KP. ORCA 03	0	0	10
4	KP. ORCA 04	0	0	10
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	0	0	10

6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	0	0	10
7	KP. PAUS 01	0	0	10
8	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	10

7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	0	0	10
2	KP. ORCA 02	0	0	10
3	KP. ORCA 03	0	0	10
4	KP. ORCA 04	0	0	10
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	0	0	10
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	0	0	10
7	KP. PAUS 01	0	0	10
8	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	10

8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR;

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	0	0	5
2	KP. ORCA 02	0	0	5
3	KP. ORCA 03	0	0	5
4	KP. ORCA 04	0	0	5
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	0	0	5
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	0	0	5
7	KP. PAUS 01	1	1	5
8	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	5

9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya.

No	Kapal Pengawas	Target	Realisasi	Nilai
1	KP. ORCA 01	0	0	5
2	KP. ORCA 02	0	0	5
3	KP. ORCA 03	0	0	5
4	KP. ORCA 04	1	1	5

5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	0	0	5
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	0	0	5
7	KP. PAUS 01	0	0	5
8	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	5

Total Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas

No	Kapal Pengawas	Jumlah Nilai	Rata-Rata
1	KP. ORCA 01	85	88.87
2	KP. ORCA 02	100	
3	KP. ORCA 03	82.75	
4	KP. ORCA 04	85.5	
5	KP. HIU MACAN TUTUL 01	92	
6	KP. HIU MACAN TUTUL 02	94	
7	KP. PAUS 01	100	
8	KP. AKAR BAHAR 01	71.75	

INDEKS PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN

DATA SAMPAI DENGAN JUNI 2022

No	Indikator Pemenuhan Logistik	Bulan						Bobot	Maksima Indeks	Perhitungan	Keterangan/Data Dukung
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (12/12)	1	1	1	1	1	1	30	90%	27	BA. BBM Akhir Bulan (Ambil dari SIGOTIK)
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (4/4)	1			1			20	90%	18	Surat Permintaan Kebutuhan BBM dari Kapal Ke Kantor dan SPJ Pembelian/BAST (Scan)
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (12/12)	1	1	1	1	1	1	30	90%	27	Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian (Scan)
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (12/12)	1	1	1	1	1	1	15	90%	13,5	Surat Pengantar Kebutuhan Air Tawar dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian (Scan)
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (4/4)	1			1			5	90%	4,5	Surat Pengantar Kebutuhan ATK, CS, Jurnal Deck/Mesin,Peta Laut, Buku Pasang Surut dan alat alat layanan lainnya dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian (Scan)
Indeks										90,00	

Koordinator Pengawakan dan Logistik

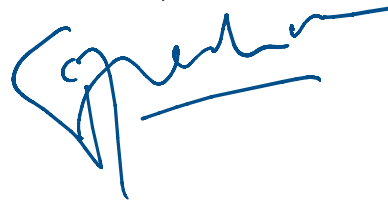


Ernawati

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TRIWULAN II TAHUN 2022

PELAYANAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN			
NO	PRODUK LAYANAN	TW I	NILAI AKHIR
1	Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	92.99	92.99
2	Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	92.99	92.99
3	Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	90.05	90.05
JUMLAH		276.03	92,01

Jakarta, 14 Juli 2022



Aulia Riza Farhan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM

Nomor : 819/PSDKP.2/RC.610/VII/2022

Yth. : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Dari : Koordinator Kelompok Operasi Pusat Pengendalian
Hal : Capaian IKU Triwulan II Tahun 2022 Kelompok Operasi Pusat
Pengendalian
Tanggal : 11 Juli 2022

Sehubungan dengan hasil pengukuran IKU Triwulan II Tahun 2022 kelompok Operasi Pusat Pengendalian, dapat kami informasikan sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN II		
			TAHUN 2022	TARGET	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	1 Tingkat keaktifan Provinsi dalam pembinaan Pokmaswas	90	20	35,29 %	176,45 %
2	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	2 Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	40	43,33 %	108,33%
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	3 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	80	92,01	115,01%
		4 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	77	77	93,14	120,96%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Aulia Riza Farhan

Tembusan:
Subkoordinator Tata Usaha Dit.POA.

No	Unit Kerja	Target Tw II	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Nilai Rata-rata
1	SETDITJEN	86%	97,08%	98,54%	97,81%
2	DIT POA	86%	100%	99,31%	99,65%
3	DIT PPSDP	86%	96,76%	99,84%	98,30%
4	DIT PPSDK	86%	98,06%	99,68%	98,87%
5	DIT PP	86%	96,44%	98,06%	97,25%

Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Satker UPT PSDKP pada Triwulan II 2022, sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	Target Tw II	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Nilai Rata-rata
1	JAKARTA	86%	88,33%	100%	94,17%
2	BITUNG	86%	88,33%	100%	94,17%
3	LAMPULO	86%	100%	94,17%	97,08%
4	BATAM	86%	98,89%	52,22%	75,56%
5	BENOA	86%	100%	100%	100%
7	TUAL	86%	100%	100%	100%
6	BELAWAN	86%	87,22%	98,89%	93,05%
8	PONTIANAK	86%	86,11%	97,78%	91,94%
9	TARAKAN	86%	88,33%	82,50%	85,42%
10	CILACAP	86%	100%	92,22%	96,11%
11	KUPANG	86%	100%	90,28%	95,14%
12	AMBON	86%	100%	100%	100%
13	TAHUANA	86%	100%	100%	100%



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B. 3020/PSDKP.1/TU.140/VII/2022

11 Juli 2022

Lampiran : 2 (dua) dokumen

Perihal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2022

Yth. (daftar terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2022 khususnya capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP”, berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d 31 Maret 2022 (Triwulan IV 2021 s.d. Triwulan I 2022) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 911/ITJ.0/TU.140/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP”, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2022 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 95.10% (tuntas 97 dari 102 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen PSDKP



ditandatangani
secara elektronik

Suharta

Tembusan:
Dirjen PSDKP

Lampiran Surat 1

Nomor : B. 3020/PSDKP.1/TU.140/VII/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

Daftar Penerima

1. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen PSDKP;
2. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP;
3. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP;
4. Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP;
5. Koordinator Kelompok Program, Ditjen PSDKP;
6. Koordinator Kelompok Keuangan dan Umum, Ditjen PSDKP;
7. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Ditjen PSDKP;
8. Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Ditjen PSDKP;
9. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen PSDKP;
10. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Ditjen PSDKP;
11. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP;
12. Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Ditjen PSDKP;
13. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap, Ditjen PSDKP;
14. Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Ditjen PSDKP;
15. Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Ditjen PSDKP;
16. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Ditjen PSDKP;
17. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Ditjen PSDKP;
18. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Ditjen PSDKP;
19. Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Ditjen PSDKP;
20. Kepala Stasiun PSDKP Biak, Ditjen PSDKP.

Sekretaris Ditjen PSDKP



ditandatangani
secara elektronik

Suharta

Lampiran Surat 2

Nomor : B. 3020/PSDKP.1/TU.140/VII/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

Data Rekapitulasi Capaian IKU

“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan II Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	32	28	87.50	4	12.50
2	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengawasan PSDK	0	0	-	0	-
4	Direktorat Pengawasan PSDP	0	0	-	0	-
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
6	Pangkalan PSDKP Lampulo	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Batam	1	1	100.00	0	-
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	1	1	100.00	0	-
9	Pangkalan PSDKP Benoa	5	5	100.00	0	-
10	Pangkalan PSDKP Bitung	0	0	-	0	-

11	Pangkalan PSDKP Tual	13	13	100.00	0	-
12	Stasiun PSDKP Cilacap	6	6	100.00	0	-
13	Stasiun PSDKP Belawan	0	0	-	0	-
14	Stasiun PSDKP Kupang	15	15	100.00	0	-
15	Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	-	0	-
16	Stasiun PSDKP Tarakan	8	7	87.50	0	-
17	Stasiun PSDKP Tahuna	6	6	100.00	0	-
18	Stasiun PSDKP Ambon	0	0	-	0	-
19	Stasiun PSDKP Biak	15	15	100.00	0	-
Total		102	97	95.10	5	4.90

*Note: untuk satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen KKP, pengisian capaian IKU menggunakan nilai minimal yaitu 70%.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 911/ITJ.0/TU.140/VII/2022

Yth : 1. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Hal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan II Tahun 2022
Lampiran : Satu Lembar
Tanggal : 7 Juli 2022

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP Triwulan II Tahun 2022, bersama ini disampaikan capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d. 31 Maret 2022 (Triwulan IV 2021 s.d. Triwulan I 2022) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni 2022 (Triwulan II Tahun 2022).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran tersebut sebesar 90,98% (827 tuntas dari 909 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hadi Pramono

Tembusan:
Plt. Inspektur Jenderal.

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 911/ITJ.0/TU.140/VII/2022
Tanggal: 7 Juli 2022

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan II Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	51	46	90.20%	5	9.80%
2	BRSDMKP	126	94	74.60%	32	25.40%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	88	69	78.41%	19	21.59%
4	Ditjen PSDKP	102	97	95.10%	5	4.90%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	117	102	87.18%	15	12.82%
6	Ditjen PRL	161	159	98.76%	2	1.24%
7	Ditjen PDSPKP	124	120	96.77%	4	3.23%
8	BKIPM	93	93	100.00%	0	0.00%
9	Itjen	47	47	100.00%	0	0.00%
TOTAL		909	827	90.98%	82	9.02%